

Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2023

Mega Rosaline Tri Setya*, Achmad Tohirin

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: 20313298@students.uii.ac.id

JEL Classification Code:

I32, J64, J24

Kata kunci:

Jumlah Penduduk Miskin, IPM, Rasio Gini, TPT, Upah Minimum.

Email penulis:

achmad.tohirin@uui.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol3.iss2.art13

Abstract

Purpose – This study aims to determine the influence of IPM, Gini Ratio, TPT and Minimum Wage on the number of poor people in Yogyakarta Special Region Province.

Methods – This study uses a panel data model that combines time series data for 2014-2023 and cross-section data in 5 districts/cities in the Special Region of Yogyakarta Province.

Findings – The results of this study show that IPM and the Gini Ratio have a significant and positive effect on the number of poor people. In contrast, TPT and Minimum Wage have a significant and negative impact on the number of poor people in Yogyakarta Special Region Province.

Implication – The government is expected to be able to optimize development programs in the health, education and economic sectors which can provide direct benefits for the poor and maintain the policy of setting minimum wages.

Originality – This study contributes to developing empirical studies on poverty in the Special Region of Yogyakarta Province using a panel data approach.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IPM, Rasio Gini, TPT dan Upah Minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode – Penelitian ini menggunakan model data panel yang menggabungkan data *time series* tahun 2014-2023 dan data *cross section* pada 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Temuan – Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa IPM dan Rasio Gini berpengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan TPT dan Upah Minimum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Implikasi – Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan program pembangunan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi para penduduk miskin serta mempertahankan kebijakan penetapan upah minimum.

Orisinalitas – Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian empiris tentang kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan data panel.

Pendahuluan

Kemiskinan adalah salah satu masalah dari ekonomi makro yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, bahkan faktor dari pemmasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh suatu daerah tertentu memungkinkan untuk memiliki faktor yang berbeda dengan faktor yang mempengaruhi kemiskinan di daerah lain. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja (Larasati Prayoga, dkk., 2021).

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal (Hardinandar, dkk., 2019). Adanya kemiskinan itu sendiri menjadi suatu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila presentase dan jumlah penduduk miskin di suatu daerah semakin kecil.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DIY Tahun 2014-2023 (Ribu Jiwa)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi DIY	532,60	550,23	894,94	488,53	460,10	448,47	475,72	506,45	454,76	448,47
Bantul	153,50	160,15	142,76	139,67	134,84	131,15	138,66	146,98	130,13	128,51
Gunung Kidul	148,40	155,00	139,25	135,74	125,76	123,08	127,61	135,33	122,82	122,54
Sleman	110,40	110,96	96,63	96,75	92,04	90,17	99,78	108,93	98,92	97,50
Kulon Progo	84,70	88,13	84,34	84,17	77,72	74,62	78,06	81,14	73,21	70,74
Yogyakarta	35,60	35,98	32,06	32,20	29,75	29,45	31,62	34,07	29,68	29,48

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, Tahun 2014-2023

Berdasarkan tabel diatas, pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi DIY setiap tahunnya mengalami fluktuasi jumlah penduduk miskin. Salah satu daerah yang memiliki penduduk miskin paling rendah di setiap tahunnya yaitu kota Yogyakarta dimana jumlah penduduknya tidak lebih dari 40 ribu jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 dan 2023 cenderung mengalami penurunan pada semua kabupaten/kota di Provinsi DIY. Namun pada tahun 2015, 2020 dan 2021 Provinsi DIY mengalami pertambahan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 & 2021 sehingga banyak masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi DIY yang kehilangan pekerjaannya karena mengalami PHK dan kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa yang berada di angka 11,04% pada tahun 2023, namun jika dilihat dari jumlah penduduknya Provinsi DIY memiliki jumlah penduduk miskin yang paling sedikit diantara provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 454,47 ribu jiwa pada tahun 2023.

Kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Kualitas tersebut dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja, apabila IPM rendah maka akan mengakibatkan produktivitas kerja juga rendah yang otomatis pendapatan pun akan ikut rendah. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Peningkatan IPM yang terjadi secara terus menerus dapat memberikan pengaruh yang baik untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan jumlah penduduk miskin.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin adalah Rasio Gini. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk di suatu daerah dapat di nilai dengan rasio gini. Apabila tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk di suatu daerah semakin tinggi, maka terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan dan nilai rasio gini mendekati 1 begitupun sebaliknya. Selain rasio gini, faktor lain yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Pengangguran memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang

termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya (Sukirno, 1944). Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah ukuran dari banyaknya jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Salah satu gambaran dampak dari tingginya tingkat pengangguran adalah akan banyaknya sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat berkurang (Samuelson dan Nordhaus, 2010).

Upah minimum juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Upah minimum merupakan standar minimum yang digunakan untuk memberikan upah kepada pekerja oleh para pelaku industri atau pengusaha di dalam lingkungan kerja. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja (Kuafman, 2000). Adanya upah yang rendah yang diterima oleh masyarakat menyebabkan pendapatan yang diterima masyarakat juga rendah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi upah minimum atau peningkatan yang terjadi pada upah minimum akan memicu penurunan jumlah penduduk miskin. Sebaliknya, semakin rendah upah minimum akan memicu peningkatan pada jumlah penduduk miskin.

Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur maupun informasi tertulis baik yang berasal dari instansi terkait maupun internet. Sumber data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2023. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Jumlah Penduduk Miskin sebagai variabel dependen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum sebagai variabel independen.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Satuan	Definisi
Jumlah Penduduk Miskin	JPM	Ribu Jiwa	Penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak.
Indeks Pembangunan Manusia	IPM	Persen	Indikator yang dapat mengukur tingkat kinerja serta menjadi urutan skala perbandingan kualitas pembangunan manusia di suatu daerah
Rasio Gini	GINI	Persen	Indikator untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk di suatu daerah
Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Persen	Tingkat pengangguran dapat di hitung melalui perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja pada periode waktu tertentu
Upah Minimum	UM	Rupiah	Standar minimum yang digunakan untuk memberikan upah kepada pekerja oleh para pelaku industri di lingkungan kerja

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel. Data yang digunakan merupakan penggabungan antara data cross section dan data time series. Data cross section yang digunakan mencakup 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY dan data time series yang digunakan selama periode 10 tahun yaitu dari tahun 2014 sampai 2023. Alat analisis yang digunakan untuk membantu proses pengolahan data yaitu menggunakan aplikasi *Eviews 12*. Bentuk regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$JPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 GINI_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 UM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$ = Koefisien variabel independen

JPM_{it} = Jumlah Penduduk Miskin Provinsi DIY (Ribu Jiwa)

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DIY (Persen)

$GINI_{it}$ = Rasio Gini Provinsi DIY (Persen)

TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DIY (Persen)

UM_{it} = Upah Minimum Provinsi DIY (Rupiah)

ε_{it} = Variabel Pengganggu

Untuk menentukan pendekatan analisis menggunakan data panel, langkah pertama adalah menemukan model terbaik untuk pengujian selanjutnya. Pendekatan ini menggunakan estimasi dari beberapa model, seperti *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Proses pemilihan model dilakukan melalui beberapa uji statistik, seperti Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk memilih antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* dan Uji Hausman digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi DIY yang mencakup nilai rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Hasil perhitungan dari analisis deskriptif yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

	JPM	IPM	RASIO GINI	TPT	UPAH MINIMUM
Mean	97,673	78,33	0,39	3,76	1.606.173
Median	98,210	79,73	0,40	3,42	1.503.875
Maximum	160,150	88,61	0,52	9,26	2.324.776
Minimum	29,450	67,03	0,30	0,98	988.500
Std.Dev	40,592	6,38	0,04	1,83	3.451.268
Obs	50	50	50	50	50

Hasil analisis deskriptif ditunjukkan pada Tabel dimana data tersebut didapatkan bahwa Kabupaten Bantul pada tahun 2015 memiliki angka jumlah penduduk tertinggi sebesar 160,15 ribu jiwa, sedangkan Kota Yogyakarta pada tahun 2019 memiliki angka jumlah penduduk miskin paling rendah yaitu sebesar 29,45 ribu jiwa. Variabel JPM memiliki rata – rata jumlah penduduk miskin sebesar 97,21 ribu jiwa dengan standar deviasi sebesar 40,59 ribu jiwa. Kota Yogyakarta pada tahun 2023 memiliki angka IPM tertinggi sebesar 88,61%, sedangkan Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2014 memiliki angka jumlah penduduk miskin paling rendah yaitu sebesar 67,03%. Variabel IPM memiliki rata – rata sebesar 78,33% dengan standar deviasi sebesar 6,38%. Kota Yogyakarta pada tahun 2022 memiliki angka rasio gini sebesar 0,52%, sedangkan Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2014 memiliki angka rasio gini paling rendah yaitu sebesar 0,30%. Variabel Rasio Gini memiliki rata – rata gini rasio sebesar 0.39% dengan standar deviasi sebesar 0,46%. Kota Yogyakarta pada tahun 2020 memiliki angka TPT tertinggi sebesar 9,16%, sedangkan Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2016 memiliki angka TPT paling rendah yaitu sebesar 0,98%. Variabel TPT memiliki rata – rata sebesar 3,76% dengan standar deviasi sebesar 1,83%. Kota Yogyakarta pada tahun 2023 memiliki nilai upah minimum tertinggi sebesar Rp. 2.324.775, sedangkan Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2014 memiliki nilai upah minimum paling rendah yaitu sebesar Rp. 988.500. Variabel Upah Minimum memiliki rata – rata sebesar Rp. 1.606.173 dengan standar deviasi sebesar Rp. 3.451.268.

Tabel 4. Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel

Variable	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.
C	2,03015	0,0000	7,987606	0,0000	2,03014	0,0000
IPM	2,49942	0,0788	2,333721	0,0436	2,49936	0,0000
RASIO GINI	16,66166	0,3492	4,090269	0,0220	16,66150	0,0000
TPT	-22,34572	0,0000	-3,600604	0,0000	-22,34550	0,0000
UPAH MIN.	-0,14347	0,0002	-0,611551	0,0000	-0,14347	0,0000
R-squared		0,5830		0,9966		0,5830
F-statistic		15,7302		15,3413		15,7301
Prob. F-stat.		0,0000		0,0000		0,0000
Observations		50		50		50

Sumber : Hasil olah data *Eviews 12*

Dalam estimasi regresi data panel dengan tujuan tujuan untuk menemukan model terbaik dalam menganalisis data, digunakan tiga pendekatan utama yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Hasil dari regresi dengan menggunakan ketiga pendekatan ini akan ditunjukkan pada Tabel 4. Setelah melakukan regresi dengan ketiga model tersebut, langkah selanjutnya adalah dengan menentukan model yang terbaik diantara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*.

Hasil Uji Pemilihan Model Regresi

Dalam memilih model regresi yang tepat dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan pengujian menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk menentukan hasil uji model regresi yang tepat diantara model *common effect* dengan *fixed effect*. Sementara itu, uji Hausman digunakan untuk menentukan hasil uji model regresi yang tepat antara model *random effect* dengan *fixed effect*.

Tabel 5. Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	1273,404410	(4,41)	0,0000
Cross-section Chi Square	241,509430	4	0,0000

Sumber : Hasil olah data *Eviews 12*

Berdasarkan dari tabel diatas, diperoleh nilai F-statistik sebesar 1273,404410 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000, dimana lebih kecil dari alpha 5% ($0,0000 < 0,05$) yang artinya menolak H_0 dan menerima H_1 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang tepat digunakan dalam menguji hipotesis adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 6. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5093,567345	4	0,0000

Sumber : Hasil olah data *Eviews 12*

Berdasarkan dari tabel diatas, diperoleh nilai Chi-square sebesar 5093,567345 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000, dimana lebih kecil dari alpha 5% ($0,0000 < 0,05$) yang artinya menolak H_0 dan menerima H_1 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang tepat digunakan dalam menguji hipotesis adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Berdasarkan uji pemilihan model yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis Uji Chow dan Uji Hausman, keduanya menunjukkan model yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 7. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7,987606	48,05456	16,62195	0,0000
IPM	2,333712	1,12079	2,08220	0,0436
RASIO GINI	4,090269	1,71765	2,38131	0,0220
TPT	-3,600604	0,55914	-6,43951	0,0000
UPAH MINIMUM	-0,611551	7,60288	-8,04368	0,0000
R-squared	0,996670	F-statistic		15,3413
Adjusted R-squared	0,996021	Prob(F-statistic)		0,0000

Sumber: Hasil olah data *Eviews 12*

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan indikator untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi. Nilai R-square yang lebih tinggi menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara kedua variabel tersebut. Dari hasil regresi pada Tabel 7 yang menggunakan model *Fixed Effect Model*, didapatkan nilai R-squared sebesar 0,996670 yang diartikan bahwa 99,66% variasi pada perubahan jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY dapat

dijelaskan oleh variabel-variabel independen di dalam model yaitu IPM, Rasio Gini, TPT, dan Upah Minimum. Sedangkan sisanya sebesar 0,34% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

Tabel 8 merupakan analisis dari *Fixed Effect Model* yang memperhitungkan pengaruh *cross effect*. Hasil analisis persamaan ini menghasilkan 5 persamaan estimasi dari masing-masing kota/kabupaten dengan konstanta yang berbeda-beda. Hasil perbedaan konstanta pada masing – masing kota/kabupaten di Provinsi DIY menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen berada pada Kabupaten Gunung Kidul. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien terbesar memiliki pengaruh yang paling signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Analisis Estimasi Koefisien *Cross Effect*

Fixed Effect (Cross Section Effect)	Effect
Kabupaten Bantul	1,56400
Kabupaten Sleman	14,10851
Kabupaten Kulon Progo	2,14095
Kabupaten Gunung Kidul	15,19747
Kota Yogyakarta	7,43944

Sumber : Hasil olah data *Eviews 12*

Pada Tabel 9 dibawah ini, memuat nilai koefisien yang akan digunakan pada persamaan *Fixed Effect Model* untuk mempertimbangkan pengaruh *period effect*. Persamaan hasil modifikasi ini merupakan persamaan umum yang menggambarkan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen untuk semua kabupaten/kota di Provinsi DIY. Persamaan ini menghasilkan persamaan estimasi tahun dengan konstanta yang berbeda-beda.

Tabel 9. Analisis Estimasi Koefisien *Period Effect*

Fixed Effect (Period Effect)	Effect
2014	1,1696
2015	8,8541
2016	1,1871
2017	22,0095
2018	11,9386
2019	10,7082
2020	-32,6268
2021	-6,6865
2022	32,1997
2023	33,4769

Sumber : Hasil olah data *Eviews 12*

Nilai koefisien terbesar menunjukkan bahwa perubahan pada variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang sangat besar pengaruhnya terhadap variabel dependen berada pada tahun 2023. Namun sebaliknya, nilai koefisien yang paling rendah menunjukkan bahwa perubahan pada variabel independen hanya berdampak kecil terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengaruh terkecil terjadi pada tahun 2020.

Hasil estimasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY pada tahun 2014-2023. Hasil pengujian model *fixed effect* ini menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel IPM sebesar 2,333712 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persen IPM akan menaikkan jumlah penduduk miskin sebesar 2,33 ribu jiwa di Provinsi DIY.

Hasil tersebut tentunya tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan di awal yang menyatakan bahwa variabel IPM akan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY. Hal ini juga tidak sesuai dengan penelitian dari Ayu (2018) yang menyatakan bahwa adanya korelasi atau hubungan negatif secara signifikan antara IPM dengan tingkat kemiskinan yang ada. Selain itu, hal ini juga tidak sesuai dengan teori pembangunan yang ada, dimana jika terjadi

peningkatan pembangunan maka seharusnya jumlah penduduk miskin dapat berkurang dengan adanya peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan tersebut. IPM yang memiliki pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin dapat terjadi karena adanya program pembangunan pemerintah yang menyangkut tiga indikator IPM seperti pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat yang masih kurang optimal. Kurang optimalnya program pembangunan yang mencakup 3 indikator tersebut dapat dirasakan dengan belum banyaknya program pembangunan yang memberikan manfaat secara langsung bagi para penduduk miskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Rasio Gini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY pada tahun 2014-2023. Hasil pengujian model *fixed effect* ini menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel rasio gini sebesar 4,090269 yang berarti bahwa apabila rasio gini naik satu persen maka akan menaikkan jumlah penduduk miskin sebesar 4,09 ribu jiwa di Provinsi DIY.

Hasil ini sesuai dengan teori yang digunakan. Pemerataan pendistribusian pendapatan yang telah dilakukan dengan baik belum tentu bisa merepresentasikan pendapatan tinggi yang diterima oleh setiap penduduk masyarakat. Rasio gini hanya mengukur tingkat distribusi pendapatan yaitu apakah di suatu daerah pendapatannya merata atau tidak, tetapi tidak mengukur seberapa tinggi pendapatan yang diterima penduduk di dalam distribusi persebaran pendapatannya. Dengan istilah lain, pendapatan merata belum tentu mencerminkan pendapatan tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat. Pengaruh rasio gini terhadap kemiskinan di Provinsi DIY memperlihatkan bagaimana ketimpangan menunjukkan profil kemiskinan itu sendiri. Pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan atau kesejahteraan dipengaruhi karena adanya peningkatan jumlah penduduk, sedangkan pertumbuhan jumlah penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin. Sebagian besar penduduk miskin memiliki anggota keluarga yang relatif banyak, sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada digaris kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY pada tahun 2014-2023. Hasil pengujian model *fixed effect* ini menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel TPT sebesar -3,600604. Dimana kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebanyak satu persen tidak meningkatkan jumlah penduduk miskin tetapi justru dari hasil penelitian ini akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 3,60 ribu jiwa di Provinsi DIY.

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Namun hal ini sejalan dengan hasil penelitian Utami & Masjkuri (2018) yang menunjukkan bahwa variabel TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, hal ini menunjukkan pola hubungan yang tidak selalu searah antara tingkat pengangguran dengan kemiskinan yang disebabkan karena tidak semua orang yang menganggur itu selalu miskin, selama dia masih mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu, tidak semua orang menganggur itu selalu miskin, karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu seperti mereka yang sedang mencari kerja, mereka yang sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Hasil penelitian membuktikan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY pada tahun 2014-2023. Hasil pengujian model *fixed effect* ini menunjukkan bahwa nilai koefisien upah minimum sebesar -0,611551 yang artinya bahwa kenaikan upah minimum sebesar satu rupiah akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,61 ribu jiwa di Provinsi DIY. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi upah minimum akan memicu penurunan pada jumlah penduduk miskin.

Hasil ini sesuai dengan teori yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini serta sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Sari (2021) dan Utami & Masjkuri (2018) yang menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil ini juga sesuai dengan tujuan penetapan upah minimum yang disampaikan Kaufman (2000) dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga

terbebas dari kemiskinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima. Hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya ketentuan nilai upah minimum jumlahnya harus berada diatas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat yang artinya bahwa adanya kenaikan upah tidak akan berarti jika angka kebutuhan hidup layak masih berkisar diatas jumlah upah minimum.

Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel IPM dan Rasio Gini memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan variabel TPT dan Upah Minimum memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY tahun 2014-2023. Implikasi dari penelitian ini adalah program pembangunan pemerintah yang mencakup tiga indikator IPM seperti pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat harus dijalankan lebih optimal oleh pemerintah. Pemerintah juga harus membuat banyak program pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi para penduduk miskin seperti memberikan pelayanan di sektor pendidikan secara gratis khususnya bagi masyarakat miskin serta perhatian pemerintah terhadap kesehatan juga harus ditingkatkan dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis. Selain itu, pemerintah perlu menekan ketimpangan distribusi pendapatan sehingga pendapatan bisa merata di setiap kalangan masyarakat serta melakukan peningkatan pendapatan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah agar pemerataan pendapatan masyarakat juga diikuti dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah Provinsi DIY harus lebih menggerakkan sektor informal karena pengangguran dalam penelitian ini menggunakan data pengangguran terbuka dimana terdapat golongan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, sedang menyiapkan usaha atau sudah mendapatkan pekerjaan namun belum mulai bekerja yang masuk dalam golongan pengangguran. Sedangkan untuk melindungi pekerja dari kemiskinan, pemerintah harus tetap melakukan kebijakan penetapan upah minimum dan menaikkan tingkat upahnya sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- Annisa, R., & Sutjipto, H. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Banten. *Tirtayasa Ekonomika*, 12(2).
- Atmodjo, D. (2017). Analisis Pengaruh Gini Rasio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.
- Indrawan, M. R. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2008-2015. *Director*, 1(2), 2018.
- Prabowo, S. (2018). Determinasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015. Universitas Islam Indonesia.
- Purwasih, W. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015. Universitas Islam Indonesia.
- Utami, H. &. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 105-116.
- Widodo, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2011-2015. Universitas Islam Indonesia.
- Yuda, S., Mega, A. P., Arissoelistyo, M., Si, D., & Dwisusilowati, M. M. (n.d.). Pengaruh Upah Minimum Dan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur.